

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAB. LINGGA

Oleh:
Khalaf Muzhaffar
NIM. 2205040017

ABSTRAK

Illegal Logging merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius karena menyebabkan kerusakan hutan, mengganggu keseimbangan lingkungan, serta menimbulkan kerugian bagi negara. Meskipun ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap pelaku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga masih ditemukan sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi yang mengatur terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga serta mengetahui efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Lingga serta Kepala UPTD KPHP Unit III Lingga, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku melalui proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Kepolisian bersama UPTD KPHP Unit III Lingga juga melaksanakan patroli, pengawasan kawasan hutan, dan penindakan terhadap pelaku. Namun, penegakan hukum belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana operasional, luasnya kawasan hutan, kondisi geografis wilayah kepulauan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* telah berjalan sesuai prosedur, tetapi efektivitas penegakan hukumnya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana operasional yang memadai, optimalisasi pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, Efektivitas Hukum

IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL LOGGING CRIMES IN LINGGA REGENCY

By:
Khalaf Muzhaffar
NIM. 2205040017

ABSTRACT

Illegal logging is a criminal offense in the forestry sector that remains a serious problem to this day because it causes forest destruction, disrupts the environmental balance, and results in financial losses for the state. Although provisions regarding prohibitions and sanctions against perpetrators have been stipulated in Law No. 6 of 2023 on Job Creation, amending Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, illegal logging practices are still found in Lingga Regency, indicating that law enforcement has not been carried out optimally. This study aims to analyze the implementation of regulations governing the criminal offense of illegal logging in Lingga Regency and to assess the effectiveness of law enforcement. The research method employed is a normative-empirical legal study using both a statutory approach and an empirical approach. Data were collected through literature review, observation, documentation, and interviews with the Head of the Criminal Investigation Unit at the Lingga Police Station and the Head of the Lingga KPHP Unit III UPTD, and were then analyzed using qualitative descriptive methods based on Barda Nawawi Arief's theory of legal effectiveness. The results of the study indicate that law enforcement has been carried out in accordance with applicable legal mechanisms through the processes of investigation, inquiry, designation of suspects, and referral of cases to the public prosecutor. The police, in collaboration with the Lingga KPHP Unit III UPTD, also conduct patrols, monitor forest areas, and take enforcement action against offenders. However, law enforcement has not been effective due to limitations in personnel, a lack of operational facilities and infrastructure, the vast expanse of forest areas, the geographical conditions of the archipelago, low public legal awareness, as well as economic and cultural factors. Therefore, it can be concluded that the implementation of law enforcement against the criminal act of illegal logging has proceeded in accordance with procedures, but the effectiveness of law enforcement still needs to be improved through strengthened interagency coordination, the provision of adequate operational resources, optimized monitoring, and increased public legal awareness.

Keywords : Law Enforcement, Illegal Logging, Legal Effectiveness.